

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Hidayat, R. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 120–132.
- Afifah, N., & Suryani, E. (2023). Analisis Penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(3), 245–257
- Agus Widiyarta, Isnii Humaidah (2023) Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Alfarizi, M. 2023. Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Alhammadi, A. A., Alhashmi, S. M., Lataifeh, M., & Rice, J. L. (2024). The Influence Of National Digital Identities And National Profiling Systems On Accelerating The Processes Of Digital Transformation: A Mixed Study Report. *Computers*, 13(9), 243.
- Andana Adytia Kusuma, Sadu Wasistiono, & Andi Pitono. (2021). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. In *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*(Vol. 13, Issue 2). <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.422>
- Andini, P., & Setiawan, A. (2023). Efektivitas Program Digitalisasi Dokumen Kependudukan. *Jurnal Governance*, 8(2), 88–101.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Anis Zahrotun Nafisah¹, Martain². (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Perspektif Teori Pilihan Publik Di Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*. *Jurnal Administrative Reform*, 12(2), 96-100.
- Anryana, Yamin, A., & Fietroh, Muh. Nur. 2023. Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188-193. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3619>
- Aryo Prasajo, R., Yuniningsih, T., & Hidayati, R. (2025). Innovation of Digital Population Identity Application at the Population and Civil Registration Service of Semarang City. *PERSPEKTIF*, 14(2), 297–306. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i2.13698>

- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31.
- Cahyani, L., & Putra, D. (2024). Adopsi Teknologi Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Teknologi dan Pelayanan Publik*, 5(1), 1–14.
- Dinta Fernanda Maulidya, Agus Widiyarta (2024) Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1544>
- Fiantika, F. R., et al. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Global Eksekutif Teknologi. Padang. 188 hlm.
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. 2023. Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510-517. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.8412238.svg>
- Fitriani, N. I., Sunariyanto, S., & Abidin, A. Z. (2025). Efektivitas Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur). *Respon Publik*, 19(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/26852>
- Gatiningsih, (2023). Kebijakan Administrasi Kependudukan. Sumedang: CV Cendekia Press.
- Gatiningsih. 2015. “Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Bandung.”, *Jurnal Dukcapil*, 3(2), 107–126. http://eprints.ipdn.ac.id/2404/1/Gati_Dukcapil_107-126.pdf
- Gemiharto, I., & Rulandari, N. (2024). Challenges Of Population Services Through Population Administration Information Systems In Jakarta Buffering Area. *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.61978/politeia.v2i1.170>
- Google Play Store. (2025). Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Di akses 1 Desember 2025. https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&hl=id.
- Handayani, T. (2023). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Penggunaan IKD. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 310–324.
- Indarwati, N., Mardianto, M., & Mirani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.28>
- Indrayani, E. (2023). Integrasi Sistem Layanan Digital: Transformasi Digital untuk Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia. CV Cendekia Press.

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Iskandar, A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Sektor Kependudukan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(3), 210–223
- Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial*, 04(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.14420/1zyvd879>
- Keban, Y. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gavamedia.
- Komariah, I., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Publik. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5593>
- Madaul, M. Z. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2926>
- Mega, D. P., Said, M. M., & Zainal, A. (2025). Implementasi Aplikasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang), 5-12.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung. 258 hlm.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota TanjungPINang. *Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>.
- Pasolong, H. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung. 282 hlm.
- Polii, T. B., & Mu'min, M. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Dan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara [Institut Pemerintahan Dalam Negeri.]. <http://eprints.ipdn.ac.id/21477/>
- Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid* 3(4), 4761- 4775.
- Putra, F. A. (2024). Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18611>

- Situmorang, C. H. (2016). *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE (SSDI).
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 334 hlm.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bnadung. Alfabeta. 444 hlm.
- Syafie, I. K., A. Tandjung., S. Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta. 263 hlm.
- Syahbano, A., & Gatningsih, G. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Transisi Ktp-el Ke Identitas Kependudukan Digital Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat[Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/20913>
- Tukan, A., & Rahmadanita, A. . 2023. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *jurnalregistratie*, 5(2), <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Waluyo, D., & Syarifuddin. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 3(1). <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5018>
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. 2023. Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>

Regulasi

- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Diakses pada 13 Februari 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/330238/perda-kab-kulon-progo-no-5-tahun-2025>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Website

App Store. (2025). Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Di akses 6 Februari 2026.
<https://apps.apple.com/id/app/identitas-kependudukan-digital/id6448944056?l=id>

Ppid.kemendagri.com, 3 Juni 2025, Panduan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Diakses Pada 12 Februari 2026.
<https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/200389938>

Dukcapil.kulonprogokab.go.id, 2022 <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/> Diakses pada 13 Februari 2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo. (2025). Surat Edaran Tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi IKD. Diakses 13 Februari 2026.
<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/publikasi/detailpengumuman/surat-edaran-tentang-pencegahan-penipuan-aktivasi-identitas-kependudukan-digital-ikd>

Harian Jogja (2025). Capaian IKD di Kulon Progo Baru 5 Persen, Kesadaran Masih Rendah. Diakses Pada 14 Januari 2026. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1224880/capaian-ikd-di-kulonprogo-baru-5-persen-kesadaran-masih-rendah>